



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUNADIAH AS'AD
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 462763

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 455.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/70 m² di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/64 m² di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 240.500.000
3. Tanah Seluas 220 m² di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G/MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, SUZUKI BLSOLO 125 SCD SHOGUN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 62.051.276

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 642.551.276

III. HUTANG Rp. 117.432.510

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 525.118.766

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.